



**RENCANA KERJA  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI MALUKU**



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenaan-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2022 telah selesai dikerjakan. Renja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Rencana Kerja merupakan pedoman dan arahan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam menjalankan seluruh aktivitas pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan secara profesional, terintegrasi dan menyeluruh dan berkelanjutan di tahun 2022. Penyelesaian Renja ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Ambon, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,



Dr. Insun Sangadji, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610704 199203 2 001

## DAFTAR ISI

	hal.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II      HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU</b> .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan data LKPJ.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	29
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
<b>BAB III     TUJUAN, SASARAN PD</b> .....	37
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	37
3.2. Program dan Kegiatan .....	40
<b>BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	46
<b>BAB V      PENUTUP</b> .....	58

## Daftar Tabel

		<b>Hal</b>
Tabel T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2023 .....	8
Tabel 2.1	Realisasi & Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	14
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku .....	28
Tabel T-C 31	Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku .....	31
Tabel T-C 32	Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku .....	36
Tabel 3.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target .....	38
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku..	40
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 .....	46

## Daftar Gambar

	<b>Hal</b>
Gambar Hubungan Renja dengan dokumen lainnya .....	2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan dan strategi Pengembangan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menekankan tentang pentingnya memiliki tolak ukur kinerja kunci pelayanan yang jelas berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan; dan rencana pencapaian program sesuai dengan Standar Pelayanan serta mendorong peningkatan kualitas konsultasi Forum multi stakeholder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Fungsi RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah adalah untuk mendukung dan mengimplementasikan rencana pencapaian visi, misi dan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Periode 2019 – 2024 dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Dengan adanya RENJA PD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku diharapkan dapat mencerminkan pengelolaan Perangkat Daerah yang terarah, efisien dan efektif dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, realistis, dan faktual sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi proses persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, pelaksanaan Forum SKPD Pendidikan, perumusan rancangan akhir RENJA, dan Pengesahan RENJA PD oleh Kepala Dinas. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan

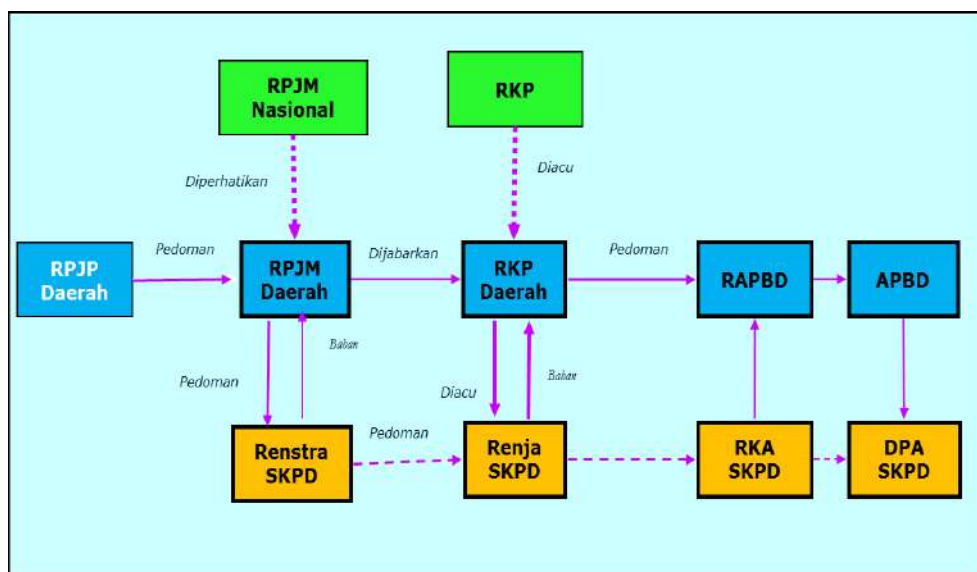
memperhatikan kaidah-kaidah aturan legal formal dan kaidah-kaidah akademik.

Dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019 – 2024 dimana bidang Pendidikan dan Kebudayaan di arahkan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Selain sebagai derivasi dari RPJMD DAN RENSTRA, RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2024 juga tetap menjaga sinergitas dengan kebijakan pendidikan dan Kebudayaan nasional yang dituangkan dalam RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, dalam kaitannya dengan perencanaan tahunan PD, RENJA ini menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta sebagai dasar pengukuran kinerja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2022. Hubungan RENJA dengan Dokumen Perencanaannya lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar.I.**

Hubungan RENJA dengan Dokumen Perencanaan lainnya



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENJA PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu menjabarkan secara operasional visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang dijabarkan melalui program Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang digambarkan dalam bentuk

program, kegiatan PD selama 1 (satu) tahun sesuai masa periode Renstra, serta dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan skala prioritas di bidang pendidikan dan Kebudayaan, memudahkan monitoring, evaluasi, dan analisis, pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik secara internal maupun eksternal. Selain itu juga sebagai kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan Kebudayaan, serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Maluku.

Tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu :

- a. Dapat merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh PD sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 1 (Satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi PD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RENSTRA berkenaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2022 disajikan sesuai sistematika sebagai berikut.

**Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

**Bab II, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun 2022**, yang mencakup tugas pokok dan fungsi, sumberdaya, pencapaian kinerja

pelayanan, serta tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

**Bab III, Tujuan dan Sasaran PD,** menjelaskan tentang telaah kebijakan nasional yang berhubungan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan serta rumusan penting isu-isu penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi PD yang dikaitkan dengan target dan sasaran pada RENSTRA PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Selain itu juga menjelaskan tentang usulan Program dan Kegiatan serta analisis kebutuhan pagu indikatif tahun 2024.

**Bab IV, Rencana Kerja dan Pendanaan PD,** yang menjelaskan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 selanjutnya disajikan pada lampiran rencana kerja.

**Bab V, Penutup,** yang menguraikan tentang kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan renja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku disusun dengan mengacu pada realisasi capaian antara renja tahun lalu (n-2) dan tahun berjalan (n-1) serta Indikator Kinerja program dan Kegiatan pada urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada table T-C29 berikut :



**TABEL T-C 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2023**

**Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021	TERGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		LOKASI
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4*100)	
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>										MALUKU
1.01	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>										MALUKU
1.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>14 Kegiatan</b>		<b>7 Layanan</b>	<b>4 Layanan</b>	<b>57,14</b>				MALUKU
		<b>Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik</b>	<b>8 Layanan</b>		<b>6 Layanan Informasi</b>	<b>6 Layanan Informasi</b>	<b>100</b>				
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		7 Dokumen	7 Dokumen	100				MALUKU
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	100%		14 Laporan	14 Laporan	100				MALUKU
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		2 Laporan	2 Laporan	100				MALUKU
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		2 Dokumen	2 Dokumen	100				MALUKU
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		4 Paket	4 Paket	100				MALUKU

1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		7 Unit	7 Unit	100				MALUKU
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		4 Laporan	4 Laporan	100				MALUKU
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 Unit	3 Unit	100				MALUKU
<b>1.01.02</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory</b>	<b>65 SMK</b>		<b>55</b>	<b>57,66</b>	<b>104,84</b>				MALUKU
		<b>Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri</b>	<b>34%</b>		<b>25</b>	<b>57,66</b>	<b>230,64</b>				MALUKU
		<b>Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</b>	<b>11%</b>		<b>15,5</b>	<b>9,69</b>	<b>62,52</b>				MALUKU
		<b>APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat</b>	<b>84%</b>		<b>100</b>	<b>80,65</b>	<b>80,65</b>				MALUKU
		<b>APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat</b>	<b>73%</b>		<b>97,81</b>	<b>59,16</b>	<b>60,48</b>				MALUKU
		<b>Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas</b>	<b>55%</b>		<b>85,19</b>	<b>47,56</b>	<b>55,83</b>				MALUKU
		<b>Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>55%</b>		<b>78,21</b>	<b>14,77</b>	<b>18,89</b>				MALUKU
		<b>Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus</b>	<b>20%</b>		<b>84,19</b>	<b>34,53</b>	<b>41,01</b>				MALUKU
		<b>Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin</b>	<b>812 Siswa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				MALUKU
		<b>Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK</b>	<b>0,04%</b>		<b>0,03</b>	<b>0,68</b>	<b>2.266,67</b>				MALUKU
		<b>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia &gt; 15 Tahun</b>	<b>12,10%</b>		<b>11,35</b>	<b>10,19</b>	<b>89,78</b>				MALUKU
		<b>Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas :</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				MALUKU
		<b>a) Literasi</b>	<b>2,24</b>								

		<b>b) Numerasi</b>	<b>2,17</b>								
		<b>Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan :</b>			-	-	-				MALUKU
		<b>a) Literasi</b>	<b>2,2</b>								
		<b>b) Numerasi</b>	<b>2,14</b>								
		<b>Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus :</b>			-	-	-				MALUKU
		<b>a) Literasi</b>	<b>2,25</b>								
		<b>b) Numerasi</b>	<b>2,13</b>								
		<b>Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter</b>	<b>2,5</b>		-	-	-				MALUKU
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100%								MALUKU
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	100%								MALUKU
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Khusus	100%								MALUKU
<b>1.01.04.</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah</b>	<b>Rasio 1 :20</b>		<b>1:48</b>	<b>1:26</b>	<b>54,17</b>				MALUKU
		<b>Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus</b>	<b>67%</b>		<b>59,30</b>	<b>27,14</b>	<b>45,76</b>				MALUKU
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Orang Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100%								MALUKU
<b>2.22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>										MALUKU
<b>2.22.02</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif</b>	<b>38 orang</b>		<b>44</b>	<b>35</b>	<b>79,55</b>				MALUKU



2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU
<b>2.22.03</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah</b>	<b>10 Event</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>				MALUKU
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%		100	100	100				MALUKU
<b>2.22.04</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>		100%								MALUKU
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU
<b>2.22.05</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan</b>	<b>15 Cagar Budaya</b>		<b>68</b>	<b>13</b>	<b>19,12</b>				MALUKU
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU
<b>2.22.06</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>		100%								MALUKU
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Museum Provinsi	100%		100	100	100				MALUKU

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Hingga akhir tahun 2022, pembangunan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup signifikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Secara umum capaian hasil pembangunan pendidikan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 Pilar, yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan;
2. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua masyarakat Maluku mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2022 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan, implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menjelaskan laporan target kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan analisis capaian kinerja yang menggambarkan tingkat ketercapaian untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan melihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi dan Capaian Sasaran Indikator Kinerja**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 5/4*100)
1	Meningkatnya Sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi	Persentase siswa SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	55%	57,66%	104,84
		Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	25%	30,82%	123,28
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	15.5%	9,69%	62,52
2	Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	100%	80,65%	80,65
		APM SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	97.81%	59,19%	60,52
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	85.19%	47,56%	55,83
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	78.21%	14,77%	10,45
		Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	84.19%	34,53%	41,02
		Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	1:258	1:296	87,16%
		Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK	0.03%	0,68%	4,41
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	11.35 Tahun	10,19 Tahun	89,78
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase guru SMA /SMK yang memenuhi Kompetensi	68.49%	34,98%	51,07
		Persentase guru SLB yang memenuhi Kompetensi	50.11%	19,29%	38,49
		Rasio Guru per siswa SMA	1:20	1:12	60
		Rasio Guru per siswa SMK	1:15	1:8	57,14
		Rasio Guru per siswa SLB	1:12	1:6	50
4	Meningkatnya karakter positif peserta didik yang memiliki	Persentase SMA /SMK/SLB yang mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam sistem pembelajaran	58.19%	27,13%	46,62

	kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif	Persentase SMA /SMK yang menyelenggarakan Kelas orang Tua Pendidikan Keluarga di sekolah	52.19%	6,92%	13,26
		Persentase SMA/SMK yang menyelenggarakan High Order Thinking Skill (HOTS)	61.19%	17,64%	28,83
5	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	68	13	19,12
		Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	8	8 Event	100
		Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	44	35	79,55
6	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Skor Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Minimal B	95		
		Jumlah layanan penunjang penunjang urusan Adminsitrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	7	4	57.14%
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	6	6	100%

Berdasarkan Tabel 2.3 maka dapat di analisis indikator kinerja sebagai berikut :

**I. Sasaran Strategis** Meningkatkan Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi :

1. Untuk indikator Persentase SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory tahun 2022, realisasinya sebesar 57,66% dari target yang telah ditetapkan yaitu 55%, dengan rata rata capaiannya 104,84%. Jika dibandingkan tahun 2021 yang dengan tingkat realisasi sebesar 32,83%, maka terjadi peningkatan sebesar 24,83%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah SMK yang aktif melaksanakan pembelajaran *Teaching Factory*. Hal ini menunjukkan bahwa Teaching factory sebagai sebuah konsep pembelajaran yang berorientasi pada produksi dan bisnis untuk menjawab

tantangan perkembangan industri saat ini dan nanti pada SMK di Maluku sudah dilaksanakan di Sebagian besar SMK yang ada di Provinsi Maluku. Jika dihitung berdasarkan skala nilai peringkat kerja maka capaian ini dinyatakan sangat memuaskan.

2. Indikator Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri tahun 2022, realisasinya adalah 82,03% dari target 25% dengan rata rata capaian adalah 328,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 16,48, maka jumlah lulusan SMK yang diterima Dunis Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 14,33%. Kenaikan yang sangat tinggi ini disebabkan karena jumlah peserta didik SMK yang diterima di DUDI Tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dimana hal ini menandakan keterserapan jumlah lululusan SMK yang di terima pada Dunia Usaha dan Dunia Industri terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Meningkatnya persentase jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia usaha dan dunia industri berdampak pada peningkatan sumberdaya manusia yang mandiri serta efektifnya kurikulum *link and match* pada jenjang Sekolah menengah Kejuruan di Provinsi Maluku.

3. Untuk indikator Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2022, realisasinya sebesar 9,69% dari target 15,5% dengan capaiannya adalah 62,52%, sementara realisasi pada tahun 2021 adalah 5,06%. Jika disbanding dengan tahun 2021, maka terjadi penihngkatan sebesar 4,63%. Kenaikan ini terjadi karena jumlah SMK yang memiliki LSP meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, meskipun mengalami peningkatan, indicator ini belum mampu untuk mencapai target. Hal ini disebabkan karena syarat

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang di keluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dimana setiap SMK di Maluku harus memiliki usaha atau kewirusahaan mandiri dengan badan hukum usaha serta memiliki surat dukungan asosiasi industry terkait atau dukungan asosiasi profesi serta memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK). Hal ini kemudian mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk terus menggerakkan kompetensi keahlian SMK mendapatkan pengakuan melalui Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP.

**II. Sasaran Strategis** Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara Berkualitas dan Merata :

1. Untuk indikator APK SMA/SMK/MA/SMALB/Sederajat untuk tahun 2022, realisasinya sebesar 80,65% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan rata rata capaian adalah 80,65%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang realisasinya adalah 100,92% maka pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 20,27%. Penurunan APK SMA/SMK/MA/SMALB/Sederajat pada tahun 2022 dikarenakan MA/Ulya/Paket C bukan lagi menjadi tupoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sehingga menyebabkan penurunan APK. Selain itu, penurunan juga terjadi karena adanya penurunan peserta didik SMA/SMK/SMLB Provinsi Maluku Tahun 2022. Namun, meskipun terjadi penurunan indicator ini dikatakan memuskan. Hal ini menunjukkan diperlukannya kebijakan perluasan akses melalui upaya memperluas daya tampung sekolah serta menyediakan akses bagi peserta didik melalui berbagai event yang dapat meningkatkan potensi kreatif sehingga berdampak pada perluasan partisipasi sekolah.
2. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/SMALB/Sederajat pada tahun 2022 di

targetkan 97.81% dengan realisasi atas target yaitu 59.19% dengan capaiannya adalah 60,52%. Jika di perbandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang terealisasi 71,87% maka pada tahun 2022 terjadi penurunan APM Pendidikan Menengah sekitar 12,68%. Penurunan ini disebabkan jumlah penduduk usia 16-18 yang berada pada jenjang Pendidikan menengah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah siswa yang ada di Provinsi Maluku. Maka daripada itu dibutuhkan kesungguhan dari Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Maluku kedepannya, sehingga semakin meluasnya hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan di Provinsi Maluku.

3. indikator Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas belum memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2022 yaitu 85.19% dengan realisasi atas target yaitu 47,56% , sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 55,83%. Dalam konteks antara target dan realisasi tahun 2022 maka capaian ini belum memenuhi target yang di tetapkan. Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi tahun 2021 maka tahun ini realisasi persentase jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada sekolah menengah atas mengalami peningkatan yang sebesar 3,56%. Peningkatan ini terjadi karena angka partisipasi siswa usia 16-18 pada jenjang sekolah menengah atas di Provinsi Maluku mengalami peningkatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Atas masih membutuhkan penanganan perluasan akses yang

lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku.

4. Indikator Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan cukup mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 78,21% dengan realisasi atas target yaitu 11,55%, sedangkan rata-rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 14,77%. Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 10,45%. Hal ini dikarenakan angka partisipasi siswa SMK usia 16-18 tahun pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah Penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Maluku. Hal ini menandakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan masih membutuhkan penanganan perluasan akses yang lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku, khususnya pada jenjang Pendidikan SMK.
5. Indikator Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus pada tahun 2022 memiliki target yaitu 84,19 dengan realisasi sebesar 34,53% dengan rata-rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 41,02%. Dalam konteks antara target dan realisasi tahun 2022, maka indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun indikator ini tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 12,50%, maka terjadi peningkatan sebesar 22,03%.



Peningkatan ini terjadi dikarenakan jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yang berpartisipasi pada jenjang Sekolah Luar biasa pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar meskipun penduduk disabilitas usia 4-18 tahun masih sangat banyak yang belum berpartisipasi dalam Pendidikan SLB. Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih keras lagi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk disabilitas usia 4 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Luar Biasa masih membutuhkan penanganan perluasan akses yang lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku serta dibutuhkan Kerjasama antar OPD Teknis untuk mengatasi masalah ini.

6. Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah merupakan upaya untuk melihat ketersediaan Sekolah di bandingkan dengan Penduduk usia Sekolah. Pada tahun 2022 di tetapkan target indikator rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah yaitu 1: 258 dengan realisasi atas target adalah 1:296 dengan akumulatif capaian adalah 87,16%, dimana hal ini berarti jumlah ketersediaan sekolah Pendidikan Menengah masih sedikit sehingga belum mampu untuk menampung keseluruhan jumlah peserta didik yang ada. Jika di bandingkan dengan tahun 2021 dengan tingkat realisasi sebesar 1:270 dengan capaian terhadap realisasi sebesar 96%, maka terjadi penurunan sebesar 8,84%. Penurunan ini terjadi karena jumlah penduduk usia sekolah melebihi proporsi ketersediaan sekolah. Hal ini menandakan bahwa proporsi ketersediaan sekolah terhadap penduduk sekolah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, semakin

rendah nilai rasio maka semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah Pendidikan menengah. Hal ini mendandakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perlu memperluas daya tampung sekolah melalui kebijakan Pembangunan Unit Sekolah baru di Provinsi Maluku.

7. Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2022 di targetkan pada angka 0,03% dengan realisasinya adalah 0,68% dengan rata-rata capaian adalah 4,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka jumlah siswa putus sekolah pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Faktor meningkatnya angka putus sekolah SMA/SMK pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 adalah factor ekonomi/kemiskinan juga akses yang masih terbatas. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), jumlah siswa putus sekolah di SMA/SMK di Maluku tahun 2022 berjumlah 3.123 yang tersebar di 11 kab/kota. Peningkatan Angka Putus Sekolah ini masih sangat jauh dari target kebijakan perluasan akses anak yang secara kemampuan ekonomi orang tua masih dibawah rata-rata dengan instrument BOSDA dan BOSNAS. Hal ini menandakan dibutuhkan upaya lebih dari *stakeholder* dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak terkait untuk mampu menurunkan angka putus sekolah SMA/SMK dengan optimalisasi memperkuat Satuan Pendidikan dengan terus mendata serta mengelola dana BOS serta bantuan beasiswa miskin dengan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menjawab kebutuhan siswa miskin.
8. Indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun pada tahun 2022 memiliki target sebesar 11.35 tahun dengan realisasi terhadap target sebesar 10,19 Tahun, sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 89,78%. Jika dibandingkan tahun 2021 yang

tingkat realisasinya mencapai 10,03 Tahun, maka terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2022 sebesar 0,19 Tahun. Dalam konteks antara target dan realisasi tahun 2022 maka capaian ini belummenuhi target. Hal ini menandakan bahwa penduduk usia > 15 tahun untuk Provinsi Maluku pada tahun 2022 yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai pada pendidikan tinggi masih kurang sehingga berdampak pada menurunnya peningkatan kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan atau *Stakeholder* khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Dinas/Badan/Bagian baik Kota maupun Kabupaten untuk dapat berjibaku meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan di Maluku, sehingga kedepannya seluruh masyarakat baik miskin maupun kaya mampu menyelesaikan Pendidikan hingga keperguruan tinggi dengan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang efisien dan tepat sasaran.

### **III. Sasaran Strategis** Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang Merata :

- 1.** Indikator Persentase guru SMA/SMK yang memenuhi Kompetensi pada tahun 2022 di targetkan 68,49% dengan realisasasi 34,98% dengan rata rata capaian sebesar 51,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki realisasi sebesar 50,77%, maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,3% dimana peningkatan ini terjadi karena jumlah guru yang memiliki yang memenuhi kompetensi meningkat pada tahun 202. Total jumlah guru SMA/SMK yang bersertifikasi pada tahun 2022 berjumlah 2848 yang terdiri dari 2754 Guru PNS dan 94 Non PNS, sementara total guru SMA/SMK di Provinsi Maluku pada tahun 2022 adalah 8142 orang. Indikator persentase guru SMA/SMK yang memenuhi

kompetensi ini dianggap cukup berhasil. Adapun faktor penyebab sehingga indikator ini dinyatakan cukup berhasil adalah dorongan dari pemerintah provinsi Maluku dalam memperluas akses bagi pendidik dengan mempersiapkan program simulasi baik itu pelatihan maupun diklat teknis. Namun perlu lagi ditingkatkan upaya untuk mendorong meningkatnya guru SMA/SMK yang memenuhi kompetensi terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- 2.** Indikator Persentase guru SLB yang memenuhi Kompetensi pada tahun 2022 di targetkan 50,11% dengan realisasi 19,29% dengan rata rata capaian adalah 38,49%. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 11,40%, sehingga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,89%. Jumlah guru SLB pada Tahun 2022 berjumlah 140 orang dimana guru yang sudah bersertifikasi berjumlah 26 orang PNS dan 1 orang Non PNS. Dibutuhkan usaha lebih khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk meningkatkan kualitas guru SLB melalui pelatihan dan diklat teknis sehingga kualitas dan kuantitas Pendidikan bagi siswa SLB dapat semakin meningkat.
- 3.** Indikator Rasio Guru per siswa SMA pada tahun 2022 di targetkan 1:20 dimana rata rata satu guru menghadapi 20 Siswa, yang realisasi terhadap target adalah 1:12 atau rata rata 1 guru menghadapi 12 siswa dengan capaian antara realisasi di bandingkan target adalah 60%. Hal yang menyebabkan samanya realisasi pada tahun 2021 dan 2022 adalah jumlah guru dan siswa tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Hal yang menyebabkan keberhasilan indikator ini karena adanya kebijakan analisis distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

4. Indikator Rasio Guru per siswa SMK pada tahun 2022 di targetkan 1:15 dimana rata rata satu guru menghadapi 15 Siswa, yang realisasi terhadap target 2022 adalah 1:8 atau rata rata setiap guru menghadapi 8 siswa dengan capaian antara realisasi di bandingkan target adalah 57,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1:9, maka terjadi penurunan realisasi pada tahun 2022. Penurunan terjadi dikarenakan, jumlah siswa SMK pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang berakibat pada menurunnya rasio guru terhadap siswa. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkan kebijakan analisis distribusi dan jabatan Pendidik pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
5. Indikator Rasio Guru per siswa SLB pada tahun 2022 di targetkan 1:12 dimana rata rata satu guru menghadapi 12 Siswa, yang realisasi terhadap target 2022 adalah 1:6 atau rata rata setiap guru menghadapi 6 siswa dengan capaian antara realisasi di bandingkan target adalah 50%. Hal yang menyebabkan keberhasilan indikator ini karena adanya kebijakan analisis distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, sehingga terjadi peningkatan pada jumlah Guru SLB di Provinsi Maluku Tahun 2022.

**IV. Sasaran Strategis** Meningkatkan Karakter Postitif Peserta Didik yang memiliki Kepribadian Unggul serta Bertanggungjawab, Kreatif dan Inovatif :

1. Indikator Persentase SMA /SMK/SLB yang mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam sistem pembelajaran pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 58.19% dengan realisasi terhadap target sebesar 27,13% dengan capaian atas perbandingan realisasi dan target adalah 46,62%. Jika

dibandingkan dengan tahun 2021, maka terjadi penurunan sebesar 26,07%. penurunan terjadi karena adanya pada Jenjang SMA sudah tidak diberlakukan lagi Pembelajaran Pendidikan Karakter, sementara SMK mengalami penurunan jumlah sekolah yang melaksanakan Pendidikan Karakter. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan Pendidikan karakter hanya pada Kurikulum K13. Keberhasilan tidak terlepas dari adanya kurikulum Pendidikan baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 yakni kurikulum Merdeka.

2. Indikator Persentase SMA /SMK yang menyelenggarakan Kelas orang Tua Pendidikan Keluarga di sekolah, pada tahun 2022 indikator ini di target 52,19% dengan realisasi terhadap target yaitu 6,92% dengan capaian atas perbandingan realisasi dan target adalah 13,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 46,80%, maka terjadi penurunan yang signifikan sebesar 39,88% pada tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan jenjang Pendidikan SMA sudah tidak menyelenggarakan kelas orang tua, sementara jumlah SMK yang menyelenggarakan hanya 29 dari 115 SMK di Provinsi Maluku.
3. Indikator Persentase SMA/SMK yang menyelenggarakan High Order Thinking Skill (HOTS), pada tahun 2022 indikator ini di target 61.19% dengan realisasi terhadap target yaitu 17,64% dengan capaian atas perbandingan realisasi dan target adalah 28,83%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 55,45%, maka terjadi penurunan sebesar 37,81% pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi dikarenakan pada Jenjang SMA sudah tidak menyelenggarakan HOTS dan digantikan dengan system pembelajaran baru yang ada pada kurikulum Merdeka. Terlepas dari upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam mengembangkan

arah kebijakan untuk peningkatan mutu guru dan siswa dalam hal Penerapan beberapa model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek (*Project based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*Problem based learning*), belajar penemuan (*Discovery/inquiry*) menjadi peluang bagi guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran pada level HOTS (*Higher order thinking skill*). Pada prakteknya, penerapan pembelajaran HOTS bukan hal yang mudah dilaksanakan oleh guru. Disamping guru harus benar-benar menguasai materi dan strategi pembelajaran, peran guru sangat dibutuhkan agar peserta didik tetap aktif dalam pembelajaran.

**V. Sasaran Strategis** Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan :

1. Indikator Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan, pada tahun 2022 di targetkan 68 Cagar Budaya dengan realisasi sebesar 13 cagar budaya yang ada di Provinsi maluku. Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka rata rata capaian adalah 19,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka terjadi penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya penetapan cagar budaya yang dilakukan pada tahun 2022, dengan hasil 13 cagar budaya yang ditetapkan pada Tahun 2021 oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Maluku, selanjutnya dilakukan pelestarian pada tahun 2022. Pelestarian ini akan terus dilakukan guna melindungi cagar budaya benda dan tak benda yang ada di Provinsi Maluku, tentunya dengan kesungguhan semua pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi maluku untuk dapat melestarikan kebudayaan yang ada.
2. Indikator Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah, pada tahun 2022 di targetkan 8 festival event dengan realisasi 8 festival event, antara lain: Pentas seni Budaya Maluku (18

pentas), Gelar Sastra (1 pentas), Gelar Teater (1 pentas), Konser Musik Tradisional Maluku (6 Pentas), Christmss Concert (4 pentas), Lomba Bertutur Kreatif Cerita Rakyat Maluku (1 pentas), Ekspresi Ramadhan (4 pentas) dan Konser Musik Akhir Tahun 2022 (5 pentas). Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka rata rata capaian adalah 100%. Jika dilihat antara target dan realisasi, maka indicator ini dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran seluruh pihak khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku untuk mengembangkan, melestarikan serta mempromosikan festival kebudayaan kepada masyarakat.

3. Indikator Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif, pada tahun 2022 di targetkan 44 pelaku budaya yang berperan aktif dengan realisasi sebanyak 35 orang pelaku budaya yang berperan aktif dengan rata-rata capaian sebesar 79,55%.

**VI. Sasaran Strategis** Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan :

1. Indikator Skor Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Minimal B, pada tahun 2022 di targetkan skor capaian SAKIP sebesar 95 dengan realisasi yaitu .... atau B. Jika di hitung capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target maka capaiannya adalah ....%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini terjadi karena kurangnya pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, maka daripada itu Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja melalui implementasi IKK, Perjanjian Kinerja dan RKT berdasarkan Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Maluku akan semakin ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku agar ke depan dapat meningkatkan standar capaian akuntablitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
2. Indikator Jumlah Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 7 Kegiatan dengan realisasi sebesar 4 kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 57,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja yang



dicapai sama sebesar 4 kegiatan atau 57,14%. Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk meningkatkan layanan penunjang urusan administrasi kepada ASN dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

3. Indikator Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik. Pada tahun 2022, indicator ini di targetkan yaitu tersedianya 6 layanan informasi publik yang bisa di akses secara elektronik dengan realisasinya adalah 6 layanan dengan capaian adalah 100%. Dalam perbandingan target dan realisasi maka indicator ini dinyatakan berhasil. Factor keberhasilan indikator ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam kurun waktu tahun 2022 terus memperluas akses layanan informasi baik bagi Guru maupun ASN dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku guna mengakses informasi untuk kepentingan informasi dan administrasi kenaikan pangkat reguler.

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**

No	Indikator layanan	IKK	Target				Realisasi		Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>1)</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>		123.736	123.741	123.746	123.751	91.480	-	338.967	462.718
1	Buku teks pelajaran		91422	91427	91432	91437	91422	-	274281	365718
2	Perlengkapan belajar		91422	91427	91432	91437	91422	-	274281	365718
3	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		3754	3759	3764	3769	3754	-	11277	15046
4	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C		296	301	306	311	296	-	903	1214
5	Penyediaan biaya personil peserta didik		97114	97119	97124	97129	97114	-	291357	388486
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		8072	8077	8082	8087	8072	-	24231	32318
7	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		262	267	272	277	262	-	801	1078
8	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		46	51	56	61	46	-	153	214
<b>2)</b>	<b>Pendidikan Khusus</b>		<b>1551</b>	<b>1551</b>	1551	<b>1551</b>	852	-	3954	5505
1	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas		0	0	0	0	0	-	0	0

2	Perlengkapan belajar		1006	1011	1016	1021	1006	-	3033	4054
3	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C		4	9	14	19	4	-	27	46
4	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		209	214	219	224	209	-	642	866
5	Penyediaan biaya personil peserta didik		503	508	513	518	503	-	1524	2042
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		147	152	157	162	147	-	456	618
7	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		6	11	16	21	6	-	33	54
8	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		9	14	19	24	9	-	42	66

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Analisis isu internal, analisis masalah internal, dan perumusan isu strategis pendidikan akan sangat berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sehingga kecenderungan masa depan adalah peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam konteks otonomi daerah dan tugas perbantuan. Dalam hal itu, terdapat 3 kecenderungan yang akan berpengaruh pada Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku antara lain :

- 1). Pemerintah Daerah mengambil langkah inisiatif dalam melaksanakan perubahan organisasi untuk merespon peran dan fungsi yang kerap berubah sesuai kebutuhan.
- 2). Tumbuhnya inisiatif dalam mengelola perubahan yang didorong oleh kekuatan internal pada tingkat satuan pendidikan dan masyarakat.
- 3). Pada tingkat PD, reformasi struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku lebih diarahkan pada semakin besarnya fungsi manajemen mutu sebagai respon positif terhadap tuntutan perkembangan global dan kebijakan desentralisasi Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pelaksanaan rencana kerja program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka permasalahan

yang di hadapi adalah merespon terhadap isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yaitu :

- a. Penguatan Efektifitas birokrasi melalui penguatan tata kelola pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pengembangan program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan penilaian kinerja guru yang tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan kompetensi guru
- c. Perluasan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata serta pemenuhan kesejahteraan siswa
- d. Pengembangan Budaya melalui pelestarian, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai adat serta kelembagaan Budaya.

#### **2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis review kebutuhan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel T-C 31**  
**Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>1.063.465.725.243</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>1.063.465.725.243</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				<b>1.061.265.724.843</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				<b>1.061.265.724.843</b>	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>14</b>	<b>608.980.921.266</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>14</b>	<b>608.980.921.266</b>	
		<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik</b>	<b>8</b>			<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik</b>	<b>8</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.813907.772	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.813907.772	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah		596.176.966.187	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah		596.176.966.187	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		350.502.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		350.502.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.474.949.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.474.949.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.053.475.906	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.053.475.906	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		950.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		950.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.481.766.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.481.766.440	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.679.353.261	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.679.353.261	
	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	Provinsi Maluku	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	65	433.797.348.577	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	Provinsi Maluku	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	65	433.797.348.577	
		Provinsi Maluku	Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	34			Provinsi Maluku	Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	34		
		Provinsi Maluku	Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	11			Provinsi Maluku	Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	11		
		Provinsi Maluku	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	84			Provinsi Maluku	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	84		
		Provinsi Maluku	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	73			Provinsi Maluku	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	73		
		Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	55			Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	55		
		Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	55			Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	55		
		Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	20			Provinsi Maluku	Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	20		
		Provinsi Maluku	Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin	812			Provinsi Maluku	Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin	812		
		Provinsi Maluku	Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,04			Provinsi Maluku	Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,04		
		Provinsi Maluku	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	12,10			Provinsi Maluku	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	12,1		
		Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas :	1			Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas : a) Literasi b) Numerasi	1		

			a) Literasi	2,24				2,24		
			b) Numerasi	2,17				2,17		
		Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan :	1			Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan : a) Literasi b) Numerasi	1	
			a) Literasi	2,20				2,2		
			b) Numerasi	2,14				2,14		
		Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus :	1			Provinsi Maluku	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus : a) Literasi b) Numerasi	1	
			a) Literasi	2,25				2,25		
			b) Numerasi	2,13				2,13		
		Provinsi Maluku	Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	2,50			Provinsi Maluku	Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	2,5	
	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		299.085.313.560	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		299.085.313.560
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus		122.707.371.017	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus		122.707.371.017
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Khusus		12.004.664.000	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Khusus		12.004.664.000
	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Provinsi Maluku	<b>Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah</b>	<b>1:20</b>	<b>18.487.455.000</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Provinsi Maluku	<b>Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah</b>	<b>1:20</b>	<b>18.487.455.000</b>
		Provinsi Maluku	<b>Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus</b>	<b>67</b>			Provinsi Maluku	<b>Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus</b>	<b>67</b>	
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Orang Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		18.487.455.000	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Orang Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		18.487.455.000
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>				<b>2.200.000.000</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>	Provinsi Maluku			<b>2.200.000.000</b>
	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	Provinsi Maluku	<b>Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif</b>	<b>38</b>	<b>826.294.400</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	Provinsi Maluku	<b>Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif</b>	<b>38</b>	<b>826.294.400</b>

	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		639.532.400	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		639.532.400	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		186.762.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		186.762.000	
	<b>Program Pengembangan Kesenian Trasional</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah</b>	<b>10</b>	<b>739.782.000</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Trasional</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah</b>	<b>10</b>	<b>739.782.000</b>	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		739.782.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		739.782.000	
	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>Provinsi Maluku</b>			<b>69.720.000</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>Provinsi Maluku</b>			<b>69.720.000</b>	
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		69.720.000	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		69.720.000	
	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan</b>	<b>15</b>	<b>564.204.000</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan</b>	<b>15</b>	<b>564.204.000</b>	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		564.204.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Provinsi Maluku	Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		564.204.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat di lakukan melalui Forum PD Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan untuk menampung aspirasi usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Kepala UPT, Kepala Cabang Dinas, Ketua MKKS SMA & SMK Kabupaten/Kota Se Maluku & Ketua MKKS SLB Kota Ambon. Proses usulan tersebut di peroleh dengan melakukan Identifikasi Program dan kegiatan, Penjelasan arah kebijakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan, pembagian kelompok diskusi untuk mematangkan usulan dan kemudian proses pleno, dan setelah itu penandatanganan berita acara pengusulan program dan kegiatan.

Usulan dari masyarakat yang di tampung melalui forum PD Pendidikan dan Kebudayaan kemudian di telaah untuk menghasilkan dokumen Rencana kerja yang berkualitas. Dari hasil identifikasi usulan yang kemudian di bahas dalam forum PD Pendidikan dan Kebudayaan terdapat beberapa isu yang menjadi prioritas dan beririsan dengan visi dan misi Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah serta RPJMD Provinsi Maluku. Berikut ini Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku :



**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>				
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah		
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah		
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah		

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Tujuan dan sasaran Renja PD 2024**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional selama kurun waktu 2019-2024. Tujuan, dan sasaran strategis Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang bertalian dengan misi yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Kode</b>	<b>Tujuan Strategis</b>
T1	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
T2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara merata dan berkualitas
T3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
T4	Terwujudnya karakter peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.
T5	Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
T6	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>
S1	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
S2	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara murah dan merata
S3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
S4	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
S5	Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

**TABEL 3.1**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERA DAN TARGET**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2024</b>
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	Sekolah	65
		Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	34
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	%	11
2	Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	84
		APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	73
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	%	55
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	%	55
		Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	%	20
		Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin	Siswa	812

		Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	%	0,04
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	%	12,10
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas		
		a. Literasi	Indeks	2,24
		b. Numerasi	Indeks	2,17
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan		
		a. Literasi	Indeks	2,20
		b. Numerasi	Indeks	2,14
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus		
		a. Literasi	Indeks	2,25
		b. Numerasi	Indeks	2,13
		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter		
			Indeks	2,50
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	%	67
		Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	Rasio	1:20
4	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya	15
		Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Event	10
		Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	Orang	38
5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan	14
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	Layanan	8

### 3.2. Program dan Kegiatan 2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran maka Program dan Kegiatan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dengan tetap mempertimbangkan Renstra dan RPJMD Provinsi Maluku dalam rangka Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas maka di usulkan 2 Urusan, 7 Program, 18 Kegiatan dan 102 Sub Kegiatan. Peningkatan kegiatan ini lebih di dasari pada upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku merespon isu isu strategis daerah dan usulan dari masyarakat melalui forum PD Pendidikan dan Kebudayaan serta melakukan harmonisasi visi dan misi daerah. Usulan program dan kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
<b>1.01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
<b>1.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
1.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
<b>1.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
<b>1.01.02</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas</b>	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	
1.01.02.1.02.02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi



1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
<b>1.01.04.</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	
<b>1.01.04.1.01</b>	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
<b>2.22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	

<b>2.22.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan
<b>2.22.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina
<b>2.22.03</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
2.22.03.1.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
<b>2.22.04</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	
<b>2.22.04.1.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat
<b>2.22.05</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	
<b>2.22.05.1.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
<b>2.22.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	
2.22.05.1.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi
2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
<b>2.22.06</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	
<b>2.22.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tidak terlepas dari keberhasilan realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didukung oleh anggaran yang memadai untuk itu kami sampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025**

**PD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		LOKASI
			KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>1.064.777.195.353</b>		<b>1.118.016.055.121</b>	<b>MALUKU</b>
<b>1.01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>			<b>1.062.577.194.953</b>		<b>1.115.706.054.701</b>	<b>MALUKU</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>608.980.921.266</b>		<b>639.429.967.329</b>	<b>MALUKU</b>
<b>1.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>1.813.907.772</b>		<b>1.904.603.161</b>	<b>MALUKU</b>

1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	504.000.000	MALUKU
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	73.500.000	MALUKU
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	31.500.000	MALUKU
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	933.907.772	1 Laporan	980.603.161	MALUKU
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	315.000.000	MALUKU
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>596.176.966.187</b>		<b>625.985.814.496</b>	MALUKU
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	595.740.390.187	12 Bulan	625.527.409.696	MALUKU
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	334.964.000	1 Dokumen	351.712.200	MALUKU
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	101.612.000	1 Laporan	106.692.600	MALUKU
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>350.502.000</b>		<b>368.027.100</b>	MALUKU
1.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	72.410.000	1 Laporan	76.030.500	MALUKU
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	278.092.000	1 Laporan	291.996.600	MALUKU
<b>1.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>1.474.949.700</b>		<b>1.548.697.185</b>	MALUKU
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	784.998.000	1 Dokumen	824.247.900	MALUKU

1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	189.960.300	1 Dokumen	199.458.315	MALUKU
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	499.991.400	10 Orang	524.990.970	MALUKU
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2.053.475.906</b>		<b>2.156.149.701</b>	MALUKU
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.991.870	1 Paket	104.991.464	MALUKU
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	299.000.000	1 Paket	313.950.000	MALUKU
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.966.600	1 Paket	209.964.930	MALUKU
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	1 Paket	210.000.000	MALUKU
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.094.000	1 Laporan	742.448.700	MALUKU
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	547.423.436	1 Dokumen	574.794.608	MALUKU
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.250.000.000</b>		<b>1.312.500.000</b>	MALUKU
1.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	900.000.000	4 Unit	945.000.000	MALUKU
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	300.000.000	3 Paket	315.000.000	MALUKU
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit	50.000.000	4 Unit	52.500.000	MALUKU
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4.481.766.440</b>		<b>4.705.854.762</b>	MALUKU

1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	99.885.400	1 Laporan	104.879.670	MALUKU
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	726.600.000	1 Laporan	762.930.000	MALUKU
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	241.500.000	MALUKU
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	3.425.281.040	1 Laporan	3.596.545.092	MALUKU
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.379.353.261</b>		<b>1.448.320.924</b>	MALUKU
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	299.993.261	5 Unit	314.992.924	MALUKU
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	200.000.000	10 Unit	210.000.000	MALUKU
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	879.360.000	1 Unit	923.328.000	MALUKU
<b>1.01.02</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>			<b>435.108.818.687</b>		<b>456.864.259.621</b>	MALUKU
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas</b>			<b>300.396.783.670</b>		<b>315.416.622.854</b>	MALUKU
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang	11.534.416.865	15 Ruang	12.111.137.708	MALUKU
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3.211.648.545	3 Ruang	3.372.230.972	MALUKU
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3.052.054.406	3 Ruang	3.204.657.126	MALUKU
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	20.557.014.377	5 Unit	21.584.865.096	MALUKU

1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	13.485.341.415	3 Ruang	14.159.608.486	MALUKU
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2.715.431.539	3 Ruang	2.851.203.116	MALUKU
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.156.401.359	3 Ruang	1.214.221.427	MALUKU
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.450.112.868	3 Ruang	1.522.618.511	MALUKU
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	827.472.181	3 Ruang	868.845.790	MALUKU
1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	413.928.015	3 Ruang	434.624.416	MALUKU
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2.612.432.214	3 Ruang	2.743.053.825	MALUKU
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Ruang	2.805.000.000	10 Ruang	2.945.250.000	MALUKU
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70.000 Peserta Didik	17.398.589.560	70.000 Peserta Didik	18.268.519.038	MALUKU
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	612.466.000	100 Peserta Didik	643.089.300	MALUKU
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	150.000.000	20 Orang	157.500.000	MALUKU
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	1.200.726.000	20 Satuan Pendidikan	1.260.762.300	MALUKU
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	284 Satuan Pendidikan	180.613.380.000	284 Satuan Pendidikan	189.644.049.000	MALUKU



1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	226.250.000	5 Dokumen	237.562.500	MALUKU
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	15 Unit	4.360.623.751	15 Unit	4.578.654.939	MALUKU
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	25 Ruang	19.220.767.524	25 Ruang	20.181.805.900	MALUKU
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1.822.900.031	5 Ruang	1.914.045.033	MALUKU
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	10.167.319.801	100 Ruang	10.675.685.791	MALUKU
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	40 Unit	802.507.219	40 Unit	842.632.580	MALUKU
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>			<b>122.707.371.017</b>		<b>128.842.739.568</b>	<b>MALUKU</b>
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	7 Ruang	12.390.143.095	7 Ruang	13.009.650.250	MALUKU
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	43.188.846.158	8 Ruang	45.348.288.466	MALUKU
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	4.470.690.029	3 Ruang	4.694.224.530	MALUKU
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.484.481.995	2 Ruang	2.608.706.095	MALUKU
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	25.157.381.650	3 Unit	26.415.250.733	MALUKU
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	1.374.738.707	2 Ruang	1.443.475.642	MALUKU
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	2.100.000.000	MALUKU

1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27000 Peserta Didik	4.847.050.000	27000 Peserta Didik	5.089.402.500	MALUKU
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	600.000.000	50 Peserta Didik	630.000.000	MALUKU
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	1.880.145.000	50 Orang	1.974.152.250	MALUKU
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	1.025.040.000	25 Satuan Pendidikan	1.076.292.000	MALUKU
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	6.736.250.000	115 Satuan Pendidikan	7.073.062.500	MALUKU
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	2.101.613.769	7 Dokumen	2.206.694.457	MALUKU
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	2.382.092.620	20 Unit	2.501.197.251	MALUKU
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3.658.636.547	15 Ruang	3.841.568.374	MALUKU
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	7.666.477.345	30 Ruang	8.049.801.212	MALUKU
1.01.02.1.02.75	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	743.784.102	3 Ruang	780.973.307	MALUKU
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>			<b>12.004.664.000</b>		<b>12.604.897.200</b>	<b>MALUKU</b>
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	197.371.050	3 Ruang	207.239.603	MALUKU
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	465.079.600	4 Ruang	488.333.580	MALUKU

1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	210.000.000	MALUKU
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	2.903.459.800	3 Unit	3.048.632.790	MALUKU
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bini Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	2 Ruang	697.619.400	2 Ruang	732.500.370	MALUKU
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	4.288.800.000	1000 Peserta Didik	4.503.240.000	MALUKU
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	560.745.000	1 Paket	588.782.250	MALUKU
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	600.000.000	30 Peserta Didik	630.000.000	MALUKU
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	208.355.950	7 Satuan Pendidikan	218.773.748	MALUKU
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Baru yang Bertambah	7 Ruang	922.759.200	7 Ruang	968.897.160	MALUKU
1.01.02.1.03.79	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	960.474.000	8 Ruang	1.008.497.700	MALUKU
<b>1.01.04.</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			<b>18.487.455.000</b>		<b>19.411.827.750</b>	<b>MALUKU</b>
<b>1.01.04.1.01</b>	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>			<b>18.487.455.000</b>		<b>19.411.827.750</b>	<b>MALUKU</b>
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	18.487.455.000	1 Laporan	19.411.827.750	MALUKU
<b>2.22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>			<b>2.200.000.400</b>		<b>2.310.000.420</b>	<b>MALUKU</b>

<b>2.22.02</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>			<b>826.294.400</b>		<b>867.609.120</b>	MALUKU
<b>2.22.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>639.532.400</b>		<b>671.509.020</b>	MALUKU
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	639.532.400	1 Objek	671.509.020	MALUKU
<b>2.22.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>186.762.000</b>	<b>1 Objek</b>	<b>196.100.100</b>	<b>MALUKU</b>
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang	186.762.000	1 Orang	196.100.100	MALUKU
<b>2.22.03</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>			<b>739.782.000</b>		<b>776.771.100</b>	MALUKU
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>739.782.000</b>		<b>210.000.000</b>	MALUKU
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Orang	200.000.000	3 Orang	210.000.000	MALUKU
2.22.03.1.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	5 Orang	200.000.000	5 Orang	210.000.000	MALUKU
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	339.782.000	1 Lembaga	356.771.100	MALUKU
<b>2.22.04</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>			<b>69.720.000</b>		<b>73.206.000</b>	MALUKU
<b>2.22.04.1.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>			<b>69.720.000</b>		<b>73.206.000</b>	MALUKU
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	69.720.000	1 Dokumen	73.206.000	MALUKU

2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			564.204.000		592.414.200	MALUKU
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			564.204.000		592.414.200	MALUKU
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	140.680.000	1 Objek	147.714.000	MALUKU
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	423.524.000	1 Objek	444.700.200	MALUKU
<b>TOTAL</b>				<b>1.064.777.195.353</b>		<b>1.118.016.055.121</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan memiliki Tujuan untuk mengarahkan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Platform utama Program Pendidikan dan Kebudayaan yang di tetapkan benar – benar didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan daerah baik yang bersifat mendesak maupun jangka panjang berdomain pemerataan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama ini secara nyata, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan seluruh jajarannya termasuk stake holder harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024 yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku. Perubahan tersebut terletak pada konsep pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang akan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara partisipatif dengan melibatkan tiga unsur utama yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Oleh karena itu, didalam mencapai target dan beberapa sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan insan Maluku yang cerdas dan Kompetitif.

Hubungan RENJA ini dengan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku lainnya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan sebagai dasar evaluasi kinerja.

RENJA ini merupakan dokumen dinamis, dimana sewaktu-waktu akan mengalami perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku.

Demikian Renja tahun 2024 ini di sampaikan, Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati setiap Upaya bersama dalam membangun Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,



**Dr. Insun Sangadji, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610704 199203 2 001